

IMPLEMENTASI NILAI - NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Ananda Deska Larasati¹, Anggun Juwita Sari², Agestika Lindra Naviru³, Desta Olivia⁴,
Velda Suci Rahmadani⁵

¹⁻⁵ Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email : anandadeska27@gmail.com¹, anggunaj2022@gmail.com², agesnvru@gmail.com³,
destaolivia97@gmail.com⁴, veldasucir@gmail.com⁵

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional serta pembentukan karakter masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara guru PPKn di SMK Citra Angkasa School. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan P5 dilaksanakan melalui berbagai tema, seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, demokrasi, teknologi, dan kewirausahaan untuk membentuk sikap tanggung jawab, toleransi, kreativitas, dan kerja sama siswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya keberanian siswa untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membentuk karakter, meningkatkan kesadaran hukum, serta menumbuhkan sikap adil dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana nasional, P5, pendidikan karakter, kesadaran hukum.

Abstrack

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and serves as a guideline for the national criminal law system and character development. This article aims to examine the implementation of Pancasila values through character education and the Project for Strengthening the Pancasila Student Profile (P5). This study uses a qualitative descriptive method, with data collected through an interview with a Civics Education teacher at SMK Citra Angkasa School. The interview findings indicate that P5 activities cover various themes, including sustainable lifestyles, local wisdom, democracy, technology, and entrepreneurship, to develop students' responsibility, tolerance, creativity, and teamwork. However, implementation faces challenges, particularly students' lack of confidence in active participation. Therefore, Pancasila

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

values need to be practiced in daily life to strengthen character, increase legal awareness, and promote fairness and responsibility.

Keywords: Pancasila, national criminal law, P5, character education, legal awareness

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat multikultural, dengan beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama, pembangunan hukum di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan diperdebatkan. Berbagai persoalan, kepentingan, harapan, dan cita-cita selalu menyertai setiap jengkal pembangunan hukum nasional. Tak lain karena pembangunan hukum nasional menjadi cara untuk membangun masyarakat secara umum, dan membangun hukum secara khusus, sehingga pembangunan hukum nasional dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat nasional. Karenanya, pembangunan hukum nasional selalu diiringi kompleksitas dari berbagai sisi, sebab harus mempertimbangkan banyak hal, baik pada saat pembentukan dan penentuan tujuan yang hendak dicapai, penegakan hukum maupun pelayanan hukum.

Salah satu conflict atau tension yang muncul dalam pembangunan hukum nasional adalah kepentingan agama/religius. Dengan mendasarkan pada argumentasi kebhinekaan (keragaman) Indonesia, berbagai seruan muncul agar penggunaan hukum yang bersendikan agama harus dihindari. Sebaliknya, seruan penggunaan Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional-lah yang harus dipergunakan. Seolah terjadi paradoks, mengingat sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan dasar religiusitas bangsa Indonesia. Titik ekstim terjadi, karena ada ketegangan antara pihak yang berupaya

menarik pembangunan hukum nasional yang memisahkan agama dengan negara (paham sekulerisme) secara murni, dan sebaliknya ada upaya menarik pembangunan hukum nasional yang sama persis dengan ajaran agama tertentu (negara agama). Kondisi ini mengharuskan dipahaminya secara lebih wajar dan rasional, bagaimana seharusnya pembangunan hukum nasional, khususnya yang berkenaan dengan dasar religius.

Menurut Dindin (2021) pelajar mempunyai peran yang sangat penting sebagai revolusioner sosial di tengah masyarakat yang sedang berkembang, karena pelajar jauh lebih memiliki semangat, kemampuan, daya saing, daya pikir serta fisik yang kuat dan tanggap. Pelajar dianggap mampu mengembangkan dan membangun perekonomian Indonesia sehingga adanya tema kewirausahaan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan pembelajaran dan pengalaman tentang bagaimana memiliki karakter seorang usahawan. Usahawan harus memiliki jiwa dan mental yang kreatif, aktif, inovatif serta berkemampuan mencari sesuatu yang berbeda, baru, dan berguna bagi banyak orang (Wibowo, 2020).

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila membuka kesempatan bagi pelajar agar dapat belajar dalam situasi yang tidak formal, dengan struktur belajar yang fleksibel, terlibat langsung dalam lingkungan sekitar, serta kegiatan belajar pembelajaran yang interaktif guna memperkuat berbagai

keterampilan dan kompetensi yang di miliki pelajar (Kemendikbudristek, 2021).

Struktur kurikulum merdeka SMA dibagikan dalam pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler. Kokurikuler dilakukan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 dibuat dalam bentuk proyek berbasis permasalahan yang ada di lingkungan pelajar. Pemecahannya menggunakan lintas disiplin ilmu yang memungkinkan pelajar menambah pengetahuannya keterampilan (Kebudayaan, K. P. D., 2021).

Transformasi pendidikan Indonesia di era kurikulum merdeka ditandai dengan adanya perubahan paradigma pembelajaran mulai dari pendekatan yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih menekankan perkembangan karakter peserta didik. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu menjadi dasar Profil Siswa Pancasila berkarakter (Ibrahim Ibrahim et al., 2023).

Profil Siswa Pancasila memiliki enam komponen karakter, diantaranya: keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kerjasama, keberagaman dunia, berfikir kritis, dan mandiri (Satria, 2024). Melalui pendekatan berbasis proyek, P5 diarahkan untuk membangun pengalaman belajar autentik yang menghubungkan peserta didik dengan konteks kehidupan nyata. Semua jenis pembelajaran di sekolah berkontribusi untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila, termasuk pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka berdampak positif

terhadap pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21, terutama dalam hal perkembangan kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, dan nilai moral peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Meskipun implementasi P5 masih menghadapi berbagai kendala seperti kesiapan guru, sarana prasarana, manajemen waktu, penilaian autentik, dan kolaborasi antar guru (Agustiani et al., 2024; Pramesti et al., 2024). Penggunaan media visual adalah strategi efektif dalam memperkuat karakter peserta didik melalui P5 (Muntazarah et al., 2024). P5 memiliki peran dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila dalam proyek tematik ataupun integrasi dengan budaya sekolah (Ibrahim Ibrahim et al., 2023; Nugrah Alvina et al., 2024; Putri et al., 2024). Selain itu, P5 berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai moral dan sosial, terutama ketika proyek terkait isu lingkungan (Fitriyani Indah Dewi et al., 2024; Hanifah et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) serta keterkaitannya dengan pembentukan kesadaran hukum nasional. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Citra Angkasa School melalui wawancara dengan guru PPKn untuk mengetahui bagaimana kegiatan P5 menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti tanggung jawab, toleransi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui peran kegiatan P5 dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan Pancasila serta menumbuhkan kesadaran hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, harmonis, dan menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional pada intinya adalah upaya menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan sumber materiil dari seluruh peraturan dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini termanifestasi dalam pergeseran paradigma KUHP Nasional [UU No. 1 Tahun 2023] dari paradigma kolonial yang retributif dan berorientasi pada pembalasan, menjadi paradigma Pancasila yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Nilai Ketuhanan [Sila 1] menuntut hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan, nilai Kemanusiaan [Sila 2] melahirkan asas perlindungan harkat martabat pelaku dan korban, nilai Persatuan [Sila 3] dan Kerakyatan [Sila 4] melahirkan mekanisme keadilan restoratif dan musyawarah, serta nilai Keadilan Sosial [Sila 5] menuntut pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan menyeimbangkan kembali kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini akan mengkaitkan temuan di lapangan mengenai pembentukan karakter melalui P5 sebagai upaya preventif di tingkat pendidikan, dengan tujuan besar dari sistem hukum pidana nasional itu sendiri, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila dan taat hukum

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen. Berdasarkan argumentasi di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses implementasi nilai-nilai Pancasila dalam program kurikulum merdeka ini bagi keberlangsungan generasi bangsa Indonesia untuk menanamkan sikap

cinta tanah air dan berjiwa nasionalisme karena Pancasila adalah sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur serta kepribadian bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan diyakini kebaikan dan kebenarannya. Untuk itu diperlukan penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila oleh generasi sekarang agar Pancasila tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman kunci (Sugiyono, 2017). Penelitian dilakukan di SMK Citra Angkasa School dengan subyek penelitian adalah Guru Mata Pelajaran PPKN, dan siswa di SMK Citra Angkasa School. Penelitian ini akan mencoba menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan sikap cinta tanah air pada kurikulum merdeka di SMK Citra Angkasa School. Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan tentang konsep arah pembelajaran dari kurikulum merdeka dan juga menjelaskan nilai-nilai Pancasila serta hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah, khususnya di SMK Citra Angkasa School.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi landasan dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan kepada peserta didik agar mereka memahami pentingnya menaati hukum, menghormati hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi keadilan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki karakter kebangsaan, tetapi juga kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Terdapat dua data dalam penelitian ini, data primer dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dari artikel ilmiah dari jurnal dan pendapat ahli. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif. Menurut pendapat dari Miles & Huberman (1994), ada tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan penelusuran artikel ilmiah dan jurnal serta referensi pendukung penelitian. Tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan yakni pengumpulan data sebanyak mungkin. Sedangkan pada tahap ketiga, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini peneliti menganalisis data berdasarkan hasil temuan dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya P5 Sebagai Fondasi Preventif Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan P5 bukan sekadar program sekolah, melainkan upaya preventif primer dalam sistem hukum pidana nasional. Sistem hukum pidana nasional yang baru dalam KUHP Nasional berparadigma Pancasila tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan. Ketika nilai tanggung jawab dan kepedulian sosial sudah ditanamkan sejak dini melalui P5, maka tujuan hukum pidana sebagai ultimum remedium untuk mencegah kejahatan akan lebih mudah tercapai.

menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam pembangunan hukum nasional.

Implementasi Kegiatan P5 Sebagai Cerminan Sila Pancasila

Tujuh tema P5 merupakan penjabaran operasional dari nilai Pancasila yang juga menjadi jiwa KUHP Nasional. Tema Bhinneka Tunggal Ika dan Suara Demokrasi adalah implementasi Sila ke-3 dan ke-4 yang mengajarkan toleransi dan musyawarah, sejalan dengan konsep Keadilan Restoratif dalam hukum pidana. Tema gotong royong dan kewirausahaan adalah implementasi Sila ke-5 yang bertujuan memperbaiki dan memandirikan pelaku, sesuai dengan tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP Nasional.

Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membentuk Kepribadian Siswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar selaku guru PPKn di SMK Citra Angkasa School, pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian siswa melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan ini merupakan salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata di lingkungan sekitar. Jika dikaitkan dengan hukum nasional, pendidikan karakter menjadi salah satu upaya untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan melalui P5, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, dan gotong royong, dapat mendorong siswa untuk memahami pentingnya menaati peraturan serta

Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya membentuk kepribadian siswa, tetapi juga mendukung terbentuknya generasi yang sadar hukum dan mampu menerapkan

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan P5 dalam Membentuk Karakter Siswa

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Azwar menjelaskan bahwa kegiatan P5 di SMK Citra Angkasa School meliputi enam tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, serta rekayasa dan teknologi dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, seperti pengolahan sampah daur ulang, pengenalan budaya daerah, kampanye kesehatan, simulasi pemilihan ketua OSIS, pembuatan karya berbasis teknologi, serta pembuatan dan pemasaran produk.

Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum nasional karena mengajarkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, kegiatan suara demokrasi dapat menanamkan pemahaman tentang kebebasan berpendapat, musyawarah, dan penghormatan terhadap pilihan orang lain. Sementara itu, kegiatan gaya hidup berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap tanggung jawab menjaga lingkungan. Adapun kegiatan kewirausahaan dapat melatih kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Penerapan nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, yaitu mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan

penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembiasaan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara serta

menghormati hak setiap individu. Oleh karena itu, kegiatan P5 dapat menjadi sarana pendidikan untuk memperkenalkan nilai-nilai hukum kepada siswa melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui pembelajaran teori di kelas.

Kendala dalam Penerapan P5 untuk Membentuk Karakter Siswa

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Azwar menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan P5 adalah siswa masih merasa canggung dan kurang berani untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Hal ini berkaitan dengan penerapan program yang masih relatif baru di sekolah sehingga siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, nilai-nilai yang diperoleh melalui kegiatan P5 perlu diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Jika dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional, kendala tersebut menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum membutuhkan proses pembiasaan yang berkelanjutan. Pemahaman mengenai aturan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku nyata, seperti menaati tata tertib sekolah, menghargai perbedaan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung

menjadi dasar dalam membangun kesadaran hukum nasional.

Harapan dan Saran terhadap Pelaksanaan P5

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Drs. Azwar Dantes Arifka, M.M. Pengalaman Keberhasilannya memerlukan pendampingan guru, berharap agar keterlibatan aktif penerapan P5 mampu membentuk siswa siswa, serta penerapan nilai-nilai Pancasila yang kompeten secara akademik dan secara konsisten dalam kehidupan sekolah memiliki karakter kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, program ini diharapkan dapat melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, bekerja sama, berpikir kritis, dan Hasil penelitian diperoleh melalui mengembangkan kreativitas.

Harapan tersebut berkaitan erat dengan pembangunan hukum nasional karena generasi muda tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga memiliki sikap bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak orang lain. Pendidikan melalui P5 dapat membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Agar pelaksanaannya lebih optimal, kegiatan P5 perlu disertai dengan pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti menaati peraturan sekolah, menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur, dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Dengan demikian, P5 tidak hanya menjadi kegiatan proyek dalam Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi sarana untuk

wujud implementasi Pancasila di tingkat preventif. Jika hukum pidana adalah upaya represif setelah terjadi kejahatan, maka P5 adalah upaya preventif sebelum terjadi kejahatan. Menanamkan Sila ke-2

menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk generasi muda yang mampu mendukung terwujudnya hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Untuk mendukung harapan tersebut, kegiatan P5 perlu dikembangkan secara kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru juga perlu memberikankesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga dapat mengembangkan inisiatif, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5 di SMK Citra Angkasa School merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembentukan karakter siswa. Meskipun masih terdapat kendala dalam partisipasi siswa dan pembiasaan nilai-nilai karakter, program ini berpotensi mengembangkan sikap positif melalui kegiatan yang kontekstual dan berorientasi pada pengalaman. Keberhasilannya memerlukan pendampingan guru, nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan disekolah.

Pada dasarnya, Sistem Hukum Pidana Nasional yang termuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah sistem hukum yang berparadigma Pancasila. Intinya adalah perubahan tujuan pemidanaan dari yang semula menghukum menjadi memperbaiki. Hal ini sejalan dengan tujuan P5 Pertama, P5 adalah

(kepedulian) dan Sila ke-5 (gotongroyong) akan mencegah lahirnya perilaku anti-sosial yang berpotensi melanggar hukum.

Kedua, kendala yang ditemukan dalam P5 yaitu belum konsistennya penerapan nilai,

sama dengan tantangan dalam hukum pidana nasional. KUHP Nasional sudah mengakomodir hukum yang hidup (living law) dan keadilan restoratif (perwujudan Sila ke-4), namun penegakannya masih butuh pembiasaan budaya hukum Pancasila yang kuat di masyarakat.

Ketiga, strategi pengembangan P5 yang kontekstual dan partisipatif adalah cerminan dari sistem pemidanaan Pancasila

yang ideal, yaitu pemidanaan yang memperhatikan latar belakang sosial pelaku, melibatkan korban, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan sekadar penjara.

Jadi, pembentukan karakter melalui P5 di sekolah merupakan fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum pidana nasional yang humanis dan berkeadilan Pancasila.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Penelitian Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Membentuk Karakter Siswa di SMK Citra Angkasa School

No	Fokus Penelitian	Temuan Hasil Wawancara	Implikasi terhadap Pembentukan Karakter
1.	Pentingnya P5 dalam pendidikan karakter	P5 merupakan program berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka yang mengembangkan karakter dan kompetensi siswa melalui permasalahan nyata di lingkungan sekitar.	Menanamkan nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab, kemandirian dan kepedulian sosial.
2.	Implementasi kegiatan P5	Kegiatan mencakup tujuh tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan.	Mengembangkan kepedulian lingkungan, cinta budaya, toleransi, demokrasi, kreativitas, kerja sama dan jiwa kewirausahaan.
3.	Kendala pelaksanaan P5	Sebagian siswa masih merasa canggung dan kurang untuk aktif. percaya diri berpartisipasi Penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari juga masih perlu diperkuat	Memerlukan pendampingan guru, peningkatan partisipasi siswa, dan pembiasaan karakter secara konsisten di lingkungan sekolah.
4.	Harapan dan strategi pengembangan P5	P5 diharapkan membentuk siswa yang kompeten secara akademik, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, mampu bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah.	Membutuhkan proyek yang kontekstual, kegiatan partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia nyata.

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Drs Azwar Dantes Arifka, M.M, guru SMK Citra Angkasa School, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Citra Angkasa School merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan P5 dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengalaman belajar yang kontekstual, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga berkesempatan mengembangkan sikap tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, toleransi, kreativitas, dan kepedulian sosial.

Pelaksanaan P5 diwujudkan melalui tujuh tema kegiatan yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Kegiatan tersebut berpotensi menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kecintaan terhadap budaya lokal, penghargaan terhadap keberagaman, kesadaran kesehatan, sikap demokratis, kemampuan berpikir kritis, serta jiwa kewirausahaan. Dengan demikian, P5 menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kendala, terutama kurangnya kepercayaan diri sebagian siswa dalam mengikuti kegiatan secara aktif dan perlunya pembiasaan nilai-nilai karakter secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran guru dalam memberikan pendampingan, motivasi, dan kesempatan berpartisipasi kepada seluruh siswa. Selain itu, sekolah perlu membangun lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai.

Pancasila, baik selama kegiatan proyek maupun dalam interaksi sehari-hari. Ini nilai-nilai Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa P5 memiliki potensi untuk mendukung pembentukan karakter siswa di SMK Citra Angkasa School. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif siswa, pendampingan guru, serta pembiasaan Pancasila secara konsisten. Dengan pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan, P5 diharapkan mampu mendukung terbentuknya peserta didik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Citra Angkasa School yang dikaitkan dengan Sistem Hukum Pidana Nasional, dapat disimpulkan sebagai berikut:

P5 merupakan fondasi preventif dari sistem hukum pidana nasional.

P5 adalah implementasi nyata nilai Pancasila di tingkat pendidikan yang bertujuan menanamkan tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan paradigma baru KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang bergeser dari retributif (pembalasan) menjadi korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang berjiwa Pancasila. P5 bekerja di hulu sebagai pencegahan kejahatan, sedangkan hukum pidana bekerja di hilir sebagai pembinaan.

Implementasi tujuh tema P5 merupakan penjabaran operasional dari Sila Pancasila.

Tema Bhinneka Tunggal Ika dan suara demokrasi adalah wujud Sila ke-3 dan ke-4 yang mengajarkan toleransi dan musyawarah, yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana. Tema gaya hidup berkelanjutan, gotong royong, dan kewirausahaan adalah wujud Sila ke-2 dan ke-5 yang mengajarkan kepedulian dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP Nasional untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan keseimbangan masyarakat.

Kendala utama adalah belum konsistennya pembiasaan nilai.

Hasil wawancara menunjukkan siswa masih merasa canggung dan kurang percaya diri untuk berpartisipasi aktif. Kendala ini membuktikan bahwa implementasi nilai Pancasila, baik dalam pendidikan karakter maupun dalam penegakan hukum pidana, tidak cukup hanya secara normatif, tetapi membutuhkan proses pembiasaan budaya hukum yang berkelanjutan dan pendampingan yang konsisten dari guru dan lingkungan sekolah.

Harapan dan strategi pengembangan bersifat kontekstual dan partisipatif.

P5 diharapkan mampu membentuk siswa yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga berkarakter Pancasila, kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Strategi ini relevan dengan cita-cita Sistem Hukum Pidana Nasional yang ideal, yaitu Yogyakarta:2009, hlm. 176. Juga Clifford Geertz, "Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara Baru," dalam Juwono Sudarsono (ed), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta: 1976, hlm. 15-20.

hukum yang kontekstual, partisipatif, dan solutif, yang memperhatikan latar belakang sosial pelaku serta melibatkan korban dan masyarakat untuk mencapai keadilan yang berkeadaban.

Dengan demikian, pembentukan karakter melalui P5 di sekolah merupakan prasyarat dan fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum pidana nasional yang humanis, adil, dan berlandaskan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Z. (2025). *Hukum Pidana*. Cilacap, Jawa Tengah: CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap, Jawa Tengah: CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap, Jawa Tengah: CV Alinea Edumedia.

Lihat Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 1. Juga Hanna Lerner dan Ash Bali, "Constitutional Design without Constitutional Moments, Lesson from Religiously Divided Societies" *Cornell International Law Journal*, Vol. 49, No. 2, 2016, hlm. 227-308.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung: 1999, hlm. 116.

Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing,

Dindin, A. (2021). *Peran pelajar sebagai agen perubahan sosial di era revolusi industri 4.0*. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 9(2), 112-125.

- Wibowo, A. (2020). *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kebudayaan, K. P. D. (2021). *Struktur Kurikulum Merdeka jenjang SMA*. Jakarta: Kemendikbud.
- Ibrahim, I., Sari, Y. N., & Wijaya, K. (2023). *Transformasi pendidikan Indonesia di era Kurikulum Merdeka: Analisis pembentukan Profil Pelajar Pancasila*. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 8(3), 201-215.
- Satria, D. (2024). *Enam komponen karakter dalam Profil Pelajar Pancasila: Kajian konsep dan implementasi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(1), 1-14.
- Agustiani, M., Suryani, N., & Pratama, A. (2024). *Tantangan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di sekolah menengah*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 45-58.
- Nugrah Alvina, A., Handayani, P., & Kusuma, W. (2024). *Peran P5 dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila melalui integrasi budaya sekolah*. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 6(1), 34-48.

- Pramesti, D., Nugroho, B., & Fitri, R. (2024). *Manajemen waktu dan penilaian autentik dalam pelaksanaan P5*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 88-99.
- Muntazarah, F., Rahmawati, L., & Azis, A. (2024). *Efektivitas media visual dalam memperkuat karakter peserta didik melalui P5*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(2), 101-113.
- Putri, N. S., Andini, T., & Ramadhan, F. (2024). *Implementasi P5 sebagai wahana pembentukan karakter di sekolah penggerak*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9(1), 15-28.
- Fitriyani, I. D., Lestari, S., & Hidayat, R. (2024). *Internalisasi nilai moral dan sosial melalui P5 bertema lingkungan hidup*. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 5(1), 23-35.
- Hanifah, N., Putri, A. R., & Saputra, D. (2025). *Penguatan karakter peduli lingkungan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 78-90.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*.



Gambar.1 Dokumentasi Kegiatan Observasi